

**Buku:**

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bohari, 2004, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Brotodihardjo, Santoso, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi Keempat, Refika Aditama, Bandung.
- Darwin, 2019, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Iskandarsyah Mudakir, 2010, *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Ismail, Tjip *et.al*, 2013, *Analisis dan Evaluasi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Jazim Hamidi, Winahyu Erwiningsih, 2000, *Yurisprudensi Tentang Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak*, PT Tatanusa, Jakarta.
- Jenkins, Glen P dan Shukla, Gangadhar P, 2005, *Public Finance in Open Economies*, McGraw Hill, USA.
- Kelly, Roy, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia (Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia)*, UI Press, Jakarta.
- Kriyantono, Rachmat, 2006, *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, Kencana, Jakarta.
- Kunarjo, 2004, *Hukum Perpajakan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Leon, Hector S. De, 1998, *The Fundamental of Taxation*, McGraw Hill, USA.
- Mardiasmo, 1995, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Moleong, Lexy, 1990 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Samudra, Aziz, 2015, *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2013, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Siahaan, Marihot P, 2004, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak*

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan*

*Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soemitro, Rochmat, 1998, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung.

Subki, Muhammad Sukri dan Djumadi, 2007, *Menyelesaikan Sengketa Melalui  
Pengadilan Pajak*, Rajagrafindo Perkasa, Jakarta.

Suandy, Erly, 2002, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.

Sumitro, Ronny Hanitjo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia  
Indonesia, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Waliyo, 2002, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.

### **Peraturan Perundangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan hasil amandemennya.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor  
12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62)

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor  
21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 130)

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2002 No. 134)

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara  
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 85)

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59)

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 130)

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244)

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2014 tentang Klasifikasi Penetapan Nilai Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Bangunan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK/03/2019 tahun 2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 71/PJ/2010 tahun 2010 tentang Tata Cara Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 tanggal 21 Maret 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ/2012 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan, Cerobong, Konveyor, Jaringan Pipa, dan Bangunan Struktur Rangka.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-41/PJ/2014 tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan dan Pelaksanaan Putusan Banding, Putusan Gugatan, dan Putusan Peninjauan Kembali.

Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 11 tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Lampiran Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ/2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Cerobong, Konveyor, Jaringan Pipa, Silo, Tangki, dan Bangunan Struktur Rangka.

### **Yurisprudensi:**

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001051.32/2018/PP/MXVIB Tahun 2019 Tanggal 27 Mei 2019.

### **Artikel:**

Fahirah, F, *et al.*, ***“Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Nilai Jual Lahan dan Bangunan Pada Perumahan Tipe Sederhana”***, Jurnal SMARTek, Vol. 8 No. 4, November 2010.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, ***Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan***, 2014.

Mufida, Erlina, *et. al.* 2014, *Peranan Hakim Pengadilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Berdasarkan UU Nomor 24 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak*, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.

**Internet:**

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, *Objek PBB yang Dibebaskan (online)*, <https://bprd.jakarta.go.id/2016/10/11/objek-pbb-yang-dibebaskan/>, diakses 11 Mei 2020

Prismono, *PGN Terus Fokus Bangun Infrastruktur Gas Bumi (online)*, <https://petrominer.com/pgn-terus-fokus-bangun-infrastruktur-gas-bumi/>, diakses 12 Mei 2020